

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan acuan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 <	Sangat Tinggi
2	76 < 90	Tinggi
3	66 < 75	Sedang
4	51 < 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam Tahun Anggaran 2017 telah menetapkan rencana strategik yang memuat isu-isu strategis yang perlu diintervensi dengan mempertimbangkan (1) kekuatan, (2) Kelemahan, (3) Peluang dan (4) Tantangan. Karena itu dalam pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari pengimplementasian pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2021 yang terinterpretasikan menjadi visi dan misi,